

TANDA - TANDA AWAL *FRAUD* DALAM PERUSAHAAN: **ANALISIS KASUS WIRECARD**

Daftar isi

I. Mengapa Perlu Mengenali Tanda - tanda Awal <i>Fraud</i> ?	2
II. Tanda - tanda Awal <i>Fraud</i>	4
III. Poin - poin Penting	10
Catatan Akhir	11

I. Mengapa Perlu Mengenali Tanda-tanda Awal *Fraud*

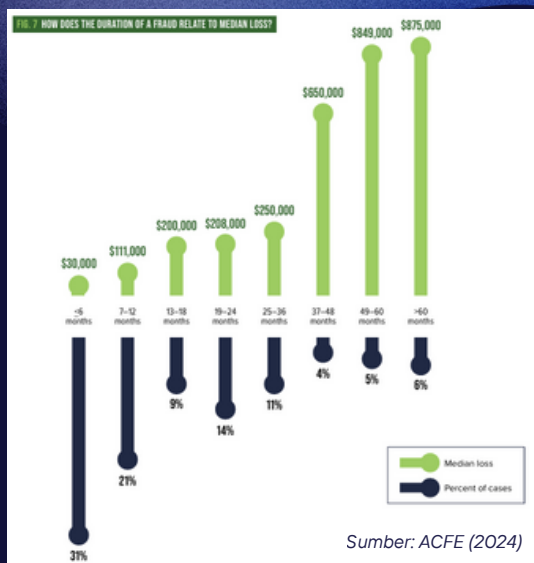
Kecurangan (*fraud*) merupakan masalah umum yang hampir selalu terjadi dan akan terus terjadi di seluruh perusahaan baik skala kecil, menengah, maupun multinasional.

Dengan nominal kerugian yang tidak kecil, perusahaan dihadapkan pada tantangan tambahan untuk dapat mengidentifikasi potensi kebocoran bahkan menutup sumber kebocoran yang timbul akibat *fraud*.



Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam surveinya menyebutkan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terdapat 1.921 kasus *fraud* dengan nilai lebih dari US\$ 3,1 miliar (Rp 51,9 triliun),^[i] riset KPMG New Zealand menuliskan dalam waktu 1 tahun terdapat 22 kasus *fraud* dengan nilai lebih dari NZ\$ 21,6 juta (Rp 214,5 miliar),^[ii] dan *Pricewaterhouse Cooper* (PwC) merilis survei yang menyebutkan bahwa *fraud*, terutama di area pengadaan (*procurement fraud*), merupakan kejahatan ekonomi yang paling disruptif secara global dalam 2 tahun ini.^[iii]

Riset dan survei yang telah disebutkan menunjukkan eksistensi *fraud* (*fraud*) tidak dapat diingkari dan dampak kerugian yang ditimbulkan juga tidak sedikit. Bahkan pada beberapa contoh kasus *fraud* di perusahaan besar berujung pada penutupan usaha ketika *fraud* yang dialami akhirnya terbongkar, seperti Enron, WorldCom, Tyco International, Lehman Brothers, Bernard Madoff, dan Wirecard.



Tidak hanya itu, kecepatan dalam mendeteksi potensi *fraud* sangat berpengaruh dalam meminimalisir potensi nilai kerugian yang diderita. Survei ACFE menyebutkan nilai kerugian dari *fraud* yang dapat dideteksi kurang dari 6 bulan bernilai Rp 500 juta (US\$ 30.000), sedangkan yang baru dapat dideteksi lebih dari 3 tahun bisa bernilai lebih dari Rp 10 miliar (US\$ 650.000).[iv]

Tahap paling awal yang menentukan seberapa cepat perusahaan dapat menutup kebocoran itu adalah memahami gejala awal dari perusahaan yang di dalamnya mengalami *fraud*.

Banyak peraturan dan pedoman yang dihadirkan menjadi kewajiban bagi perusahaan yang diharapkan dapat mencegah terjadinya *fraud*, di antaranya kewajiban prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perusahaan (Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau "UU PT"), kewajiban menyusun laporan keuangan dan diaudit oleh akuntan publik bagi perseroan terbatas (UU PT), pedoman penyusunan laporan keuangan (Standar Akuntansi Keuangan, IFRS, GAAP), kewajiban penerapan tata kelola yang baik di sektor perbankan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016), dan pedoman pengendalian internal dan anti penyuapan (COSO *Framework* dan ISO 37001).

Namun sekalipun perusahaan menerapkan seluruh kewajiban dalam peraturan - peraturan tersebut, beberapa kasus menunjukkan bahwa hal tersebut belum cukup dan memadai untuk memastikan *fraud* tidak terjadi. Beberapa kasus mengingatkan bahwa perusahaan yang berskala besar dengan beragam prestasi bahkan dapat memperoleh penghargaan untuk tata kelola yang baik sekalipun, tetap tidak menjamin terbebas dari *fraud*.

Perusahaan berbasis di India bernama *Satyam Computer Services Limited* ("Satyam") dikenakan denda sebesar US\$ 10 juta[v] akibat dari kecurangan memanipulasi kenaikan (*overstatement*) nilai pendapatan dan kas perusahaan lebih dari US\$ 1 miliar.[vi] Satyam pernah diberikan penghargaan *Golden Peacock* untuk *Corporate Governance* dan direktornya juga pernah mendapat penghargaan Ernst & Young's ("EY") *Entrepreneur of the Year*. [vii]

Contoh lainnya adalah Wells Fargo & Company ("Wells Fargo"), perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang jasa keuangan didirikan sejak 1852 bahkan menempati peringkat 29 di majalah Fortune sebagai korporasi terbesar di Amerika tahun 2019. Di tahun 2020, Wells Fargo terungkap melakukan kecurangan dengan menciptakan transaksi dan akun fiktif serta penggunaan identitas pelanggan tanpa izin yang dilakukan sejak 2002 hingga 2016, dan karenanya harus membayar penalti sebesar US\$ 3 miliar.[viii]

Publikasi ini akan menyorot isu penting dari upaya menutup kebocoran keuangan perusahaan yang diakibatkan *fraud* yaitu dengan mengenali gejala awal dari potensi *fraud* di suatu perusahaan. Para pemegang saham, komisaris, direksi, bahkan karyawan perlu membangkitkan kewaspadaan atas *fraud* agar dapat mencegahnya sejak dini dengan memperhatikan tanda - tanda awal yang akan dijelaskan di bawah. Publikasi ini menyoroti kasus *fraud* yang terjadi di Wirecard yang digunakan sebagai contoh rujukan penulisan.



II. Tanda - tanda Awal *Fraud*

Tanda - tanda awal *fraud* yang dijelaskan di bawah diperoleh dari hasil analisis atas peristiwa yang terjadi di Wirecard yang selanjutnya dikomparasi dengan beragam referensi seperti regulasi di Indonesia, prosedur atau pedoman domestik dan internasional, praktik umum, dan pengalaman penulis.

Perlu dipahami bahwa tanda - tanda yang akan dijelaskan di bawah tidak serta merta menjadi bukti telah terjadinya *fraud*. Diperlukan penelusuran lebih lanjut melalui mekanisme investigasi untuk memperoleh bukti - bukti konkret yang tidak terbantahkan yang menunjukkan bahwa *fraud* benar - benar terjadi.

II.1 Profil Wirecard

Wirecard AG, Einsteinring 35, 85609 Ascheim ("Wirecard"), perusahaan Jerman yang merupakan penyedia jasa pemrosesan pembayaran elektronik, didirikan pada 6 Mei 1999.[ix]

Wirecard menyediakan jalur pemrosesan pembayaran antara pelanggan dan pedagang retail melalui berbagai saluran pembayaran seperti kartu kredit, debit, *e-wallet*, Alipay atau WeChat Pay,[x] yang pada awalnya sebagian besar terkait dengan situs judi dan pornografi.[xi]

Wirecard masuk ke dalam bursa saham sejak 25 Oktober 2000,[xii] dan masuk ke dalam daftar DAX, indeks pasar saham Jerman untuk 40 perusahaan terbesar di Jerman,[xiii] di tahun 2018.[xiv]

Di 25 Juni 2020, Wirecard telah mengajukan insolvensi (ketidakmampuan membayar) ke pengadilan distrik Munich.[xv] Yang selanjutnya di tahun - tahun berikutnya diikuti dengan proses penjualan berbagai anak perusahaan Wirecard yang tersebar di beberapa negara, salah satunya di Indonesia yang bernama PT Prima Vista Solusi.[xvi]

Kejadian ini didahului dengan pengungkapan dari EY, auditor Wirecard sejak tahun 2010, di 18 Juni 2020 yang menyatakan bahwa € 1,9 miliar (Rp 36,2 triliun)[xvii] tidak dapat terlacak keberadaannya di rekening bank Wirecard.[xviii] Di 22 Juni 2020, Wirecard mengatakan bahwa dana tersebut sebenarnya tidak ada (fiktif).[xix]

Dana tersebut merepresentasikan lebih dari setengah nilai kas Wirecard yang tercatat di September 2019 (nilai kas per September 2019 adalah € 3,29 miliar) atau seperempat nilai aset Wirecard yang tercatat di September 2019 (nilai aset per September 2019 adalah € 7 miliar).[xx]

Apa yang menyebabkan hilangnya dana tersebut?

Serta bagaimana dana tersebut dapat muncul di laporan keuangan perusahaan namun sebenarnya fiktif?

Akan dijelaskan pada poin - poin berikut sebagai tanda - tanda awal yang perlu diperhatikan karena mungkin tanda serupa juga terjadi di perusahaan pembaca.

II.2 Tanda - tanda Awal di Area Akuntansi Perusahaan

★ II.2.1 Transaksi Keuangan Tidak Disertai Dokumen Pendukung

Berdasarkan laporan audit khusus KPMG yang dituliskan oleh *Financial Times*, disebutkan bahwa banyak dokumen pendukung yang esensial dari transaksi keuangan tidak diberikan oleh Wirecard ataupun muncul saat detik - detik terakhir.[xxi] Salah satunya adalah bukti pembayaran asli atas transaksi bernilai € 1 miliar.

PSAK[xxii] 16 tentang Aset Tetap paragraf 7 mengatur bahwa salah satu syarat diakuinya biaya perolehan aset adalah jika biaya tersebut dapat diukur secara andal.

Agar suatu transaksi atau peristiwa dapat dinilai secara andal maka diperlukan adanya bukti nyata yang menunjukkan bahwa transaksi atau peristiwa tersebut benar - benar terjadi. Salah satu caranya adalah dengan adanya bukti pendukung transaksi contohnya kontrak, *invoice*, bukti pembayaran, dan serah terima barang/ jasa.

Beberapa regulasi yang mewajibkan adanya dokumen pendukung atas suatu transaksi antara lain kewajiban menyampaikan dokumen pendukung oleh Wajib Pajak untuk verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Peraturan Menteri Keuangan No. 58 tahun 2023) dan kewajiban menyampaikan dokumen pendukung oleh eksportir kepada Bank Indonesia terkait devisa hasil ekspor dengan kriteria tertentu (Peraturan Bank Indonesia No. 7 tahun 2023).

✳ II.2.2 Pengeluaran dengan Deskripsi yang Tidak Jelas Peruntukannya dan Supplier yang Bidang Usahanya Tidak Sejalan dengan Deskripsi Pengeluaran

Salah satu bentuk *fraud* yang terjadi di Wirecard adalah mengeluarkan dana dari rekening bank Wirecard menggunakan transaksi fiktif dan *invoice* fiktif, melalui perusahaan di Singapura bernama Jacobson Fareast Marketing Services Pte. Ltd (“Jacobson”).[xxiii]

Berdasarkan data direktori usaha Singapura, Jacobson bergerak di bidang perdagangan tekstil dan kulit sebagai bisnis utamanya dan perdagangan furnitur sebagai bisnis sekundernya.[xxiv]

Henry Yeo Chiew Hai (“Yeo”), direktur Jacobson, bekerjasama dengan Edo Kurniawan (“Edo”) dan James Aga Wardhana (“Wardhana”), keduanya representatif dari Wirecard Asia, terkait pengiriman dana dari rekening Wirecard Asia ke rekening Jacobson sebesar S\$ 123.070 (Rp 1,58 miliar)[xxv] yang dikirim melalui 2 kali transfer dana di Oktober dan Desember 2018.[xxvi]

Selanjutnya, Yeo menarik dana dari rekening Jacobson dan memberikannya kepada Wardhana. Yeo menerima 3% komisi dari nilai keseluruhan transaksi yaitu senilai S\$ 3.585.

Yeo diminta untuk menyiapkan *invoice* fiktif sesuai dengan template *invoice*, rincian nilai *invoice*, dan deskripsi *invoice* yang berbunyi “*marketing and intelligence reports*” yang sebelumnya dikirimkan oleh Wardhana berdasarkan instruksi Edo.[xxvii]

Merujuk kepada kasus Wirecard tersebut, *invoice* dengan deskripsi "*marketing and intelligence reports*" merupakan salah satu contoh transaksi dengan deskripsi yang tidak jelas peruntukannya. Selain itu, bidang usaha Jacobson yang bergerak di usaha tekstil, kulit, dan furnitur, juga tidak sesuai dengan deskripsi transaksi.

Suatu transaksi pengeluaran seharusnya dapat ditelusuri komponen - komponen penting yang mendasarinya yaitu antara lain justifikasi diperlukannya pengeluaran tersebut, mekanisme pemilihan *supplier*, bukti telah dibayarnya *supplier*, bukti telah diterimanya pembayaran oleh *supplier*, bukti telah diterimanya barang/ jasa, dan aktualisasi penggunaan barang/ jasa. Jika terdapat ketidaksesuaian di antara komponen - komponen tersebut, maka perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui sumber permasalahannya, yang tidak jarang berujung kepada *fraud*.

✳ II.2.3 Transaksi Tidak Sesuai dengan Proses Bisnis yang Berjalan pada Umumnya

Pada skema *fraud* Wirecard yang melibatkan perusahaan bernama Jacobson, permintaan pembuatan *invoice* fiktif diberikan oleh Wardhana kepada Yeo sebelum transfer dana kedua dilakukan.[xxviii]

Karenanya, satu *invoice* yaitu untuk transfer dana di Oktober 2018 dibuat mundur (*backdated*), dengan kata lain transfer telah dilakukan namun *invoice* baru dibuat.

Siklus pengeluaran (*expenditure cycle*) yang dikemukakan oleh James A. Hall membagi proses pengeluaran menjadi 2 subsistem yang menjadi karakteristik utama yaitu subsistem pemrosesan pembelian dan subsistem pengeluaran dana.[xxix]

Pengiriman *invoice* dari supplier masuk dalam tahapan subsistem pemrosesan pembelian, yang terjadi sebelum subsistem pengeluaran dana.[xxx] Maka, jika pengeluaran dana dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian *invoice* dikirimkan, hal itu merupakan anomali dari proses bisnis yang berjalan pada umumnya.

✳ II.2.4 Keraguan terhadap Prosedur Akuntansi dalam Pengakuan Pendapatan

Berdasarkan laporan audit khusus KPMG yang dituliskan oleh Financial Times, disebutkan bahwa terdapat keraguan dalam beberapa aspek dalam laporan keuangan yang antara lain terkait mekanisme penghitungan cadangan kas, pengakuan pendapatan yang diperoleh melalui partner bisnis pihak ketiga, prosedur *know-your-customer*, dan manajemen risiko.[xxxi] Selain itu, juga tidak dapat dilakukan verifikasi keaslian transaksi bisnis dengan pihak ketiga Wirecard yang nilai transaksinya membentuk setengah bagian dari nilai penjualan grup.[xxxii] Pihak ketiga tersebut merupakan rekan bisnis yang memiliki lisensi pemrosesan pembayaran di negara tertentu yang tidak dimiliki oleh Wirecard atau disebut "*third party acquirer*".

Merujuk kepada PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, terdapat 5 tahapan yang terdiri dari identifikasi kontrak pelanggan, identifikasi kewajiban pelaksanaan, penentuan harga transaksi, pengalokasian harga transaksi dengan kewajiban pelaksanaan, dan pengakuan jika telah diselesaikannya kewajiban pelaksanaan. Berdasarkan kelima tahapan tersebut, maka menjadi indikasi penyimpangan jika pendapatan diakui meskipun tidak dapat diidentifikasi kontraknya, kewajiban para pihak, harga, dan bukti penyelesaian kewajiban.

II.3 Tanda - tanda Awal di Area Hukum Perusahaan



★ II.3.1 Instruksi dari Pimpinan Cenderung Diberikan Secara Verbal dan Tidak Direkam Baik Melalui Tulisan, Suara, atau Video

Berdasarkan laporan audit khusus KPMG yang dituliskan oleh Financial Times, disebutkan bahwa senior manajer Wirecard tidak merekam notulensi rapat bahkan pada saat rapat direksi.[xxxiii]

Merujuk regulasi di Indonesia, pasal 100 ayat (1) UU PT mewajibkan direksi untuk membuat risalah rapat direksi dan memeliharanya. Risalah tersebut harus memuat semua yang dibicarakan dan diputuskan pada saat rapat.[xxxiv] Jika direksi tidak mengelola risalah rapat direksi terlebih lagi tidak membuatnya, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran UU PT seperti yang disebutkan.

Salah satu alasan pentingnya membuat risalah rapat adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala keputusan yang dibuat dan dapat menjadi bukti ketika terjadinya perselisihan. Tidak hanya risalah rapat, bentuk lain pengambilan keputusan seperti instruksi untuk melakukan sesuatu, juga perlu direkam dengan tujuan yang sama. Sehingga, jika instruksi dari tingkat lebih tinggi lebih sering diberikan dalam bentuk verbal, hal itu perlu menjadi perhatian.

★ II.3.2 Status Legalitas Pihak Ketiga Diragukan

Financial Times merilis hasil penelusurannya atas kasus Wirecard yang mana salah satunya terkait transaksi dengan *"third party acquirer"* yang berbasis di Dubai bernama Al Alam Solutions ("Al Alam").

Disebutkan bahwa nilai transaksi mencapai setengah dari keuntungan Wirecard di tahun 2016.[xxxv] Salah satu contoh transaksi mencurigakan terjadi di tahun 2017, yang mana berdasarkan dokumen yang diperoleh Financial Times, Al Alam melakukan pemrosesan pembayaran sekitar € 46 juta setiap 30 hari untuk pelanggan bernama Cymix Prepaid.

Cymix Prepaid merupakan perusahaan Irlandia yang bergerak di bisnis kartu prabayar dengan tipe perseroan terbatas perseorangan (*single member private company limited by shares*).

Berdasarkan database sentral registrasi korporasi Irlandia, perusahaan didirikan tahun 2006 namun telah berstatus "Likuidasi" (*Dissolved*) dan tutup di tahun 2012.[xxxvi]

Indonesia memiliki database administrasi hukum badan usaha bernama AHU (Administrasi Hukum Umum) yang dapat diakses secara *online*. AHU dapat dijadikan sebagai rujukan pengecekan status legalitas badan usaha pihak ketiga yang bekerjasama dengan perusahaan.

Menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan pengecekan legalitas pihak ketiga terlebih dahulu sebelum melakukan kerjasama. Kerjasama dengan pihak ketiga yang dipertanyakan legalitasnya menjadi peringatan penting adanya sesuatu yang tidak wajar.

II.4 Tanda – tanda Awal di Area Digital Perusahaan



★ II.4.1 Tanggal Dokumen Pendukung Transaksi Dibuak Mundur (*Backdated*)

Pada skema *fraud* Wirecard yang melibatkan perusahaan bernama Jacobson, diketahui satu *invoice* yaitu untuk transfer dana di Oktober 2018 dibuat mundur (*backdated*).

Melalui mekanisme Forensik Digital yaitu dengan membandingkan tanggal antara yang tertera dalam dokumen (surat) dengan tanggal metadata[xxxvii] dokumen dalam bentuk digital (*Date Created, Date Modified, Date Accessed*), dokumen pendukung yang tanggalnya dibuat mundur dapat dideteksi.

Karenanya penting bagi perusahaan untuk tidak hanya menyimpan dokumen dalam bentuk *hardcopy* namun juga dalam bentuk *softcopy*.

✦ II.4.2 Komunikasi dengan Pihak Ketiga Banyak Dilakukan Pribadi dan Tidak Menggunakan Jalur Komunikasi Resmi Perusahaan

Yeo diketahui mengirimkan *invoice* fiktif yang disebutkan sebelumnya kepada Wardhana melalui Telegram.[xxxviii] Dalam berkomunikasi, Yeo, Wardhana, dan Edo tergabung dalam satu grup *chat* Telegram.[xxxix]

Segala bentuk komunikasi yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan seharusnya dilakukan melalui jalur komunikasi resmi perusahaan seperti email perusahaan, internal *messenger*, *file transfer protocol* resmi, dan lainnya. Tidak hanya dalam lingkup internal namun juga terutama dengan pihak ketiga atau eksternal. Komunikasi yang terlalu sering menggunakan jalur pribadi, di saat perusahaan telah menyediakan jalur resmi, merupakan salah satu praktik yang perlu diwaspadai.

III. Poin – poin Penting

Tanda - tanda awal *fraud* penting untuk diperhatikan sedini mungkin tidak hanya untuk mencegah kerugian yang lebih besar, namun juga menjaga keberlangsungan hidup perusahaan. Belajar dari kasus Wirecard, metode identifikasi di atas dapat juga diterapkan di perusahaan pembaca yaitu dengan cara:

a. Identifikasi tanda awal di area Akuntansi dilakukan dengan fokus terhadap:

- transaksi operasional perusahaan yang berhubungan dengan keuangan contohnya nilai penjualan atau pengeluaran meningkat signifikan tidak berdasar, barang masuk atau barang keluar tidak disertai surat jalan, dll;
- proses bisnis yang berkaitan dengan transaksi operasional keuangan perusahaan contohnya siklus pendapatan (*revenue cycle*), siklus pengeluaran (*expenditure cycle*), siklus produksi barang/ jasa, dan prosedur penggajian dan aset tetap; dan
- prosedur akuntansi perusahaan.

b. Identifikasi tanda awal di area Hukum dilakukan dengan fokus terhadap:

- transaksi operasional perusahaan yang berhubungan dengan produk hukum contohnya klausul yang tidak lazim dalam kontrak, ketentuan berpotensi melanggar peraturan dalam kontrak, *supplier* menggunakan nama pihak lain dalam perizinan yang dipersyaratkan, dll;
- proses bisnis yang berkaitan dengan produk hukum contohnya prosedur penyusunan kontrak, prosedur tinjauan (*review*) kontrak, prosedur perolehan perizinan, dan prosedur pembuatan dokumen hukum lainnya.

c. Identifikasi tanda awal di area Digital dilakukan dengan fokus terhadap:

- perilaku penggunaan teknologi contohnya kecenderungan penggunaan perangkat digital milik pribadi, frekuensi penggunaan jalur tidak resmi untuk berkomunikasi dengan internal maupun eksternal, *password* sharing dengan orang lain, pola waktu akses ke perangkat digital tertentu, dll;
- informasi pada dokumen hardcopy dikomparasi dengan dokumen *softcopy*, salah satunya terkait metadata.

Catatan Akhir

[i] ACFE, "Occupational Fraud 2024: A Report to The Nations." hlm. 7. Kurs BI tanggal 2 Mei 2025, US\$ 1 = Rp 16.762. Bank Indonesia, "Kurs Transaksi BI." <https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx>.

[ii] KPMG, "Fraud Barometer, Edition 5, November 2023." hlm.1, <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/nz/pdf/2023/11/fraud-week/fraud-barometer-2023-v2.pdf>, diakses pada 2 Mei 2025. Kurs BI tanggal 2 Mei 2025, NZ\$ 1 = Rp 9.933. Bank Indonesia, "Kurs Transaksi BI." <https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx>.

[iii] PwC, "PwC's Global Economic Crime Survey 2024: Meeting Tomorrow's Challenges, Embracing Risk Intelligently." hlm. 4, 2024-global-economic-crime-survey.pdf, diakses pada 2 Mei 2025.

[iv] ACFE, "Occupational Fraud 2024: A Report to The Nations." hlm. 15. Kurs BI tanggal 2 Mei 2025, US\$ 1 = Rp 16.762. Bank Indonesia, "Kurs Transaksi BI." <https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx>.

[v] Case 1:11-cv-00672-ESH, U.S. Securities and Exchange Commission vs Satyam Computer Services Limited d/b/a Mahindra Satyam, United States District Court for the District of Columbia, hlm. 4. <https://www.sec.gov/divisions/enforce/claims/docs/satyam-final-judgment.pdf>, diakses pada 2 Mei 2025.

[vi] US Securities and Exchange Commission, "SEC Charges Satyam Computer Services with Financial Fraud." <https://www.sec.gov/news/press/2011/2011-81.htm>, diakses pada 2 Mei 2025.

[vii] Dealbook, "Past Graft Is Tainting New India." <https://archive.nytimes.com/dealbook.nytimes.com/2009/01/20/past-graft-is-tainting-new-india/>, diakses pada 2 Mei 2025.

[viii] Penyelesaian yang dilakukan oleh Wells Fargo dilakukan melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement. US Department of Justice, "Wells Fargo Agrees to Pay \$3 Billion to Resolve Criminal and Civil Investigations into Sales Practices Involving the Opening of Millions of Accounts without Customer Authorization." <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/wells-fargo-agrees-pay-3-billion-resolve-criminal-and-civil-investigations-sales-practices>, diakses pada 2 Mei 2025.

[ix] Laporan Keuangan Wirecard AG tahun 2018, hlm. 31 dan 127.

[x] Laporan Keuangan Wirecard AG tahun 2018, hlm. 31 dan 127.

[xi] Jenny Hill dan Paul Kirby, "Wirecard Trial of Executives Opens in German Fraud Scandal." <https://www.bbc.com/news/world-europe-63893933>, diakses pada 2 Mei 2025.

[xii] Laporan Keuangan Wirecard AG tahun 2018, hlm. 28.

[xiii] Sebelum 2021, indeks DAX hanya terdiri dari 30 perusahaan terbesar di Jerman. Matt Ford, "Germany: DAX Index Hits Record High of 22,000 Points." <https://www.dw.com/en/germany-dax-index-hits-record-high-of-22000-points/a-71574229>, diakses pada 2 Mei 2025.

[xiv] Reuters, "Timeline: The rise and fall of Wirecard, a German tech champion." <https://www.reuters.com/article/technology/timeline-the-rise-and-fall-of-wirecard-a-german-tech-champion-idUSKBN2B811J/>, diakses pada 2 Mei 2025.

[xv] Wirecard, "Opening of the Insolvency Proceedings of Wirecard AG." <https://www.wirecard.com/2020/08/25/opening-of-the-insolvency-proceedings-of-wirecard-ag-2/>, diakses pada 2 Mei 2025.

[xvi] Wirecard, "Further Sale in Indonesia – Transactions Completed in Hong Kong and Malaysia." <https://www.wirecard.com/2021/07/12/further-sale-in-indonesia-transactions-completed-in-hong-kong-and-malaysia/>, diakses pada 2 Mei 2025.

[xvii] Kurs BI tanggal 2 Mei 2025, € 1 = Rp 19.073. Bank Indonesia, "Kurs Transaksi BI." <https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx>.

[xviii] Mark Sweney, "German Payments Firm Wirecard Says Missing €1.9bn may not exist." <https://www.theguardian.com/business/2020/jun/22/german-payments-firm-wirecard-says-missing-19bn-may-not-exist>, diakses pada 2 Mei 2025.

[xix] Mark Sweney, "German Payments Firm Wirecard Says Missing €1.9bn may not exist." <https://www.theguardian.com/business/2020/jun/22/german-payments-firm-wirecard-says-missing-19bn-may-not-exist>, diakses pada 2 Mei 2025.

[xx] Q3 Laporan Keuangan Wirecard 2019, hlm. 11 dan 21.

[xxi] Financial Times, "Wirecard: What KPMG's Report Found." <https://www.ft.com/content/4bed8775-01aa-457f-9dbb-1740e67a684d>, diakses pada 2 Mei 2025.

[xxii] PSAK adalah standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia.

[xxiii] Varun Karthik, "Singaporean Businessman Involved in Wirecard Case Jailed 12 Months." <https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/singaporean-businessman-involved-in-wirecard-case-jailed-12-months>, diakses pada 2 Mei 2025.

[xxiv] SGP Business, "JACOBSON FAREAST MARKETING SERVICES PTE. LTD." <https://www.sgpbusiness.com/company/Jacobson-Fareast-Marketing-Services-Pte-Ltd>, diakses pada 2 Mei 2025.

[xxv] Kurs BI tanggal 2 Mei 2025, S\$ 1 = Rp 12.843. Bank Indonesia, "Kurs Transaksi BI." <https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx>.

[xxvi] Varun Karthik, "Singaporean Businessman Involved in Wirecard Case Jailed 12 Months." <https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/singaporean-businessman-involved-in-wirecard-case-jailed-12-months>, diakses pada 2 Mei 2025.

[xxvii] Varun Karthik, "Singaporean Businessman Involved in Wirecard Case Jailed 12 Months." <https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/singaporean-businessman-involved-in-wirecard-case-jailed-12-months>, diakses pada 2 Mei 2025.

[xxviii] Varun Karthik, "Singaporean Businessman Involved in Wirecard Case Jailed 12 Months." <https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/singaporean-businessman-involved-in-wirecard-case-jailed-12-months>, diakses pada 2 Mei 2025.

[xxix] James A. Hall. *Accounting Information System*, Edisi Ketujuh, Mason: Cengage Learning, 2011, hlm. 217.

[xxx] James A. Hall. *Accounting Information System*, Edisi Ketujuh, Mason: Cengage Learning, 2011, hlm. 219.

[xxxi] Financial Times, "Wirecard: What KPMG's Report Found." <https://www.ft.com/content/4bed8775-01aa-457f-9dbb-1740e67a684d>, diakses pada 2 Mei 2025.

[xxxii] Financial Times, "Wirecard: What KPMG's Report Found." <https://www.ft.com/content/4bed8775-01aa-457f-9dbb-1740e67a684d>, diakses pada 2 Mei 2025.

[xxxiii] Financial Times, "Wirecard: What KPMG's Report Found." <https://www.ft.com/content/4bed8775-01aa-457f-9dbb-1740e67a684d>, diakses pada 2 Mei 2025.

[xxxiv] Bagian penjelasan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[xxxv] Financial Times, "Wirecard's Suspect Accounting Practices Revealed." <https://www.ft.com/content/19c6be2a-ee67-11e9-bfa4-b25f1f42901>, diakses pada 2 Mei 2025.

[xxxvi] Core, "Cymix Prepaid Services Limited." <https://core.cro.ie/e-commerce/company/449917>, diakses pada 2 Mei 2025.

[xxxvii] Informasi mengenai suatu data contohnya author, ukuran dokumen, date created, date modified, date accessed, titik koordinat, dll.

[xxxviii] Varun Karthik, "Singaporean Businessman Involved in Wirecard Case Jailed 12 Months." <https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/singaporean-businessman-involved-in-wirecard-case-jailed-12-months>, diakses pada 2 Mei 2025.

[xxxix] Lydia Lam, "Company Director Jailed for Conspiring to Embezzle S\$123,000 from Wirecard Asia." <https://www.channelnewsasia.com/singapore/wirecard-jail-embezzle-company-director-henry-yeo-3589296>, diakses pada 2 Mei 2025.